

**PENGARUH PENERAPAN PENGUKURAN NILAI WAJAR ASET BANK
TERHADAP ASIMETRI INFORMASI YANG DIMODERASI OLEH
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Tahun 2017-2019)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



OLEH:

YANA FIMANSYAH

NIM/TM: 19043194/2019

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

Judul : Pengaruh Penerapan Pengukuran Nilai Wajar Aset Bank pada Asimetri Informasi yang Dimoderasi oleh *Good Corporate Governance* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)

Nama : Yana Fimansyah

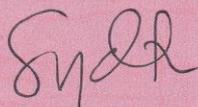
Nim/TM : 19043194/2019

Jurusan : Akuntansi (S1)

Fakultas : Ekonomi

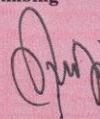
Padang, 16 Agustus 2021

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi



Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA
NIP. 19800103 200212 2 001

Disetujui oleh:
Pembimbing



Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19720910 199802 2 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian
Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang.

Judul : Pengaruh Penerapan Pengukuran Nilai Wajar Aset Bank
pada Asimetri Informasi yang Dimoderasi oleh *Good
Corporate Governance* (Studi Empiris pada Perusahaan
Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2017-2019)

Nama : Yana Fimansyah

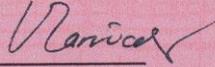
Nim/TM : 19043194/2019

Jurusan : Akuntansi (S1)

Fakultas : Ekonomi

Padang, 16 Agustus 2021

Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Nurzi Sebrina, SE., M.Sc., Ak	1. 
2. Anggota	: Vanica Serly, SE., M.Si	2. 
3. Anggota	: Mayar Afriyenti, SE., M.Sc	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yana Fimansyah
Thn. Masuk/NIM : 2019/19043194
Tempat/Tgl. Lahir : Payakumbuh/22 Oktober 1997
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Kel. Tigo Koto Dibuah, No.49, Kota Payakumbuh
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Penerapan Pengukuran Nilai Wajar Aset Bank pada Asimetri Informasi yang Dimoderasi oleh *Good Corporate Governance* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya/pendapat yang telah ditulis/dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah, apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, 16 Agustus 2021

Yang menyatakan,



Yana Fimansyah
Yana Fimansyah
NIM. 19043194

ABSTRAK

Yana Fimansyah. (19043194/2019). Pengaruh Penerapan Pengukuran Nilai Wajar Aset Bank Terhadap Asimetri Informasi yang Dimoderasi oleh *Good Corporate Governance* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019).

Pembimbing : Nurzi Sebrina, SE., M.Sc., Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah penerapan pengukuran nilai wajar (*fair value measurement*) untuk aset bank mengurangi asimetri informasi di antara investor ekuitas (*bid-ask spread*) dan bagaimana hal ini dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Populasi penelitian adalah perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019 yang dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* sehingga jumlah sampel penelitian sebanyak 31 perusahaan dengan waktu pengamatan 3 tahun. Pengujian hipotesis menggunakan model regresi linier berganda. Temuan kami menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh dari penerapan pengukuran nilai wajar terhadap asimetri informasi dan tata kelola perusahaan yang baik juga tidak berpengaruh pada hubungan antara pengukuran nilai wajar dengan asimetri informasi. Implikasi dari penelitian ini menambah literatur akuntansi keuangan yang membuktikan bahwa penerapan pengukuran nilai wajar pada tingkat yang rendah tidak dapat menangkap dan menyajikan informasi yang relevan dalam jumlah yang tinggi, sehingga fenomena asimetri informasi tidak dapat diminimalisir secara maksimal. Selain itu, pada tingkat penerapan pengukuran nilai wajar yang rendah, tata kelola perusahaan yang baik belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan sebagai variabel moderasi. Disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk menggabungkan FVTPL dengan OCI untuk melihat efek yang lebih komprehensif. Karena tingkat penggunaan FVTPL pada tahun pengamatan masih rendah.

Keywords: *Banks; Fair Value Measurement; Financial Instrument; Good Corporate Governance; Information Asymmetry*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Pengukuran Nilai Wajar Aset Bank Terhadap Asimetri Informasi yang Dimoderasi oleh *Good Corporate Governance* (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)”**. Skripsi ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Ibunda tercinta Erma Evi dan Ayahanda Gimman serta kakak penulis Wira Fimansyah, S.Pd., M.Pd dan abang penulis Febri Fimansyah yang selalu memberikan doa dan dukungan baik berupa moral maupun materil.
2. Ibu Sany Dwita, SE., M.Si., Ph.D., Ak., CA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
3. Ibu Nurzi Sebrina, SE., M.Sc., Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan ilmu pengetahuan yang luas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Vanica Serly, SE., M.Si selaku dosen penelaah yang telah memberikan saran-saran dan tambahan pengetahuan dalam pembuatan skripsi ini.
5. Ibu Mayar Afriyenti, SE., M.Sc selaku dosen penguji yang dengan segala kerendahan hati telah menguji dan memberikan saran-saran kepada penulis untuk membuat skripsi ini lebih baik lagi.
6. Seluruh staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu lancarnya penyelesaian skripsi ini.
7. Terkhusus untuk para idola penulis, Mbak Maudy Ayunda yang selalu memberikan inspirasi dan semangat belajar yang tinggi serta kepada *Rider* MotoGP Marc Marquez yang telah menginspirasi dan mengajarkan penulis tentang semangat berjuang dan bekerja keras dalam mencapai cita-cita dan impian dalam hidup ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, hal itu disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan kurangnya pengalaman. Penulis berharap skripsi ini akan berguna bagi seluruh pihak yang terkait dan semoga bimbingan dan ilmu diberikan kepada penulis dapat berguna serta menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Padang, 16 Agustus 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN TEORI, PENGEMBANGAN HIPOTESIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL HIPOTESIS	14
A. Kajian Teori	14
1. Teori <i>Stakeholders</i>	14
2. Asimetri Informasi	16
3. Pengukuran Nilai Wajar.....	22
4. <i>Good Corporate Governance</i>	26
B. Penelitian Terdahulu	37
C. Pengembangan Hipotesis	41
D. Kerangka Konseptual	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Populasi dan Sampel	49
C. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	53
D. Variabel Penelitian dan Pengukuran	53
E. Teknik Analisis Data.....	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	63
A. Gambaran Umum Pasar Modal Indonesia	63

1. Pasar Modal Indonesia	63
2. Sejarah Bursa Efek Indonesia	66
B. Gambaran Umum Perusahaan Perbankan di Indonesia	67
C. Deskripsi Variabel Penelitian.....	69
1. Asimetri Informasi	70
2. Pengukuran Nilai Wajar	76
3. <i>Good Corporate Governance</i>	81
4. Ukuran Perusahaan.....	85
D. Statistik Deskriptif	89
E. Analisis Induktif.....	90
1. Analisis Model Regresi Panel	90
2. Model Regresi Panel	92
F. Pembahasan Hasil Uji Hipotesis	96
1. Pengaruh Pengukuran Nilai Wajar (<i>Fair Value Measurement</i>) Aset Bank Terhadap Asimetri Informasi.....	96
2. Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dalam Memoderasi Hubungan antara Pengukuran Nilai Wajar Aset Bank Terhadap Asimetri Informasi	100
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan dan Implikasi	103
B. Keterbatasan.....	104
C. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	48

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	37
2. Kriteria Pengambilan Sampel	50
3. Daftar Sampel Penelitian	51
4. <i>Bid-Ask Spread</i> pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama Periode Pelaporan 2017-2019	73
5. Aset Keuangan Perusahaan Perbankan yang Diukur pada <i>Fair Value Through Profit or Loss</i> (FVTPL) Periode 2017-2019	78
6. Data <i>Good Corporate Governance</i> Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019	82
7. Total Aset Perusahaan Perbankan selama Periode Pelaporan 2017-2019	86
8. Statistik Deskriptif	89
9. Hasil Uji Chow	90
10. Hasil Uji Hausman	91
11. Hasil Uji Lagrange Multiplier	92
12. Hasil Regresi Model Panel	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Asimetri Informasi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019	109
2. Data <i>Assets Completeness</i> 1	112
3. Data <i>Assets Completeness</i> 2	116
4. Data Good Corporate Governance Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019.....	122
5. Total Aset Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019	125
6. Statistik Deskriptif	128
7. Estimasi Pembuatan Model Regresi	128
8. Hasil Regresi Model 1.....	133
9. Hasil Regresi Model 2.....	134

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis karena merupakan suatu alat untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui laporan keuangan tahunan (Lubis, 2019). Lebih lanjut, Ramadhani & Sebrina (2020) menyatakan bahwa laporan keuangan sebagai hasil dari proses akuntansi merupakan sebuah media komunikasi antara perusahaan dengan para *stockholders* mereka sehingga, untuk memenuhi perannya sebagai media komunikasi laporan keuangan harus memiliki kualitas informasi yang memadai dan berdaya guna. Akuntansi akan memiliki peran yang nyata jika informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dapat mengendalikan perilaku pengambilan keputusan ekonomik secara rasional dan efisien (Suwardjono, 2014). Oleh karena itu, informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan haruslah transparan, relevan dan disajikan tepat waktu sehingga informasi dapat berguna bagi para pengambil keputusan.

Pada zaman sekarang, informasi sudah dianggap sebagai salah satu sumber daya yang penting. Hal ini karena, tingkat penguasaan informasi dapat mempengaruhi tindakan seseorang. Mereka yang memiliki tingkat informasi yang tinggi dapat memilih alternatif tindakan terbaik dibandingkan dengan mereka yang memiliki informasi yang relatif rendah (terbatas). Hal ini mendorong setiap pihak yang berkepentingan menginginkan informasi yang disajikan dan dipublikasikan secara lengkap, transparan, relevan dan tepat waktu sehingga proses pengambilan keputusan mereka menjadi lebih rasional.

Permasalahannya adalah dalam praktik akuntansi dan pelaporan keuangan, informasi merupakan komoditas yang sangat kompleks. Alasan utama dari kompleksitas informasi ini adalah tidak adanya konsep dan standar akuntansi yang sempurna atau benar. Akibatnya, individu tidak memiliki kesamaan dalam reaksi mereka bahkan terhadap informasi yang sama. Kedua, informasi akuntansi tidak hanya mempengaruhi keputusan individu tetapi juga mempengaruhi reaksi pasar. Dalam bukunya Scott (2015) menyatakan dan mengakui bahwa dalam suatu transaksi bisnis salah satu pihak mungkin memiliki keunggulan informasi atas pihak lain atau mungkin mengambil tindakan yang tidak dapat diobservasi oleh pihak lain. Hal inilah yang disebut dengan fenomena asimetri informasi (*adverse selection and moral hazard*).

Asimetri informasi terus menjadi permasalahan mendasar pada bidang ilmu akuntansi. Hal ini dikarenakan fenomena asimetri informasi dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi, khususnya disini adalah investor sebagai *stakeholders*. Oleh karena itu, *standard setters* terus mencoba mencari regulasi baru guna mampu melindungi para investor. Karena sifat dari informasi yang kompleks dan penting maka sangat diperlukan regulasi yang mengatur sebaik mungkin karena kekuatan pasar sendiri dianggap tidak mampu lagi mengendalikan permasalahan asimetri informasi.

Beberapa upaya terus dilakukan untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan fenomena asimetri informasi yang masih sering terjadi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi asimetri informasi adalah melalui penggunaan pengungkapan (*full disclosure*) atas laporan keuangan

(Sutedja, 2006). Selain dengan pengungkapan atas laporan keuangan menurut Lisa (2012) asimetri informasi yang muncul sebagai akibat dari adanya hubungan antara *principal* dan *agent* dapat ditekan dengan adanya *corporate governance* yang baik. Selain solusi di atas, *standard setters* juga menganggap bahwa konsep biaya historis (*historical cost*) ternyata tidak lagi relevan dan tidak mampu melindungi kepentingan investor atas informasi yang memadai untuk keputusan yang diambil saat ini. Oleh karena itu, *standard setters* mulai memperkenalkan konsep baru yaitu, *fair value measurement* yang diyakini dapat menyajikan informasi yang lebih relevan (Scott, 2015). Bahkan, selama dua dekade terakhir Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) dan Dewan Standar Akuntansi International (IASB) telah membahas apakah pengukuran nilai wajar (FVM) harus diperluas ke elemen yang lebih lengkap dari instrumen keuangan. Hal ini menyusul dari pandangan bahwa konsep pengukuran biaya historis yang tidak mampu lagi menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu terkait perubahan arus kas dan/atau risiko aset (Fontes, dkk, 2018)

Pengenalan konsep *fair value* ini memancing para peneliti diberbagai negara untuk melakukan penelitian guna menguji apakah konsep baru yang diperkenalkan oleh *standard setters* ini memiliki pengaruh signifikan atau tidak. Penelitian oleh Fontes, dkk (2018) dan Attawalbeh (2020) membuktikan bahwa penggunaan pengukuran nilai wajar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat asimetri informasi. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat asimetri informasi dapat diminimalisir dengan menggunakan pengukuran nilai

wajar sehingga, konsep pengukuran nilai wajar ini dianggap sebagai salah satu solusi yang menjanjikan.

Pengukuran nilai wajar (*Fair value measurement*) yang disingkat dengan FVM dalam penelitian ini diyakini dapat menyajikan informasi yang lebih informasional dan relevan bagi pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan pengukuran akuntansi berbasis biaya historis. Hal ini sejalan dengan Ball (2006) yang mengatakan bahwa IASB dan FASB lebih menyarankan untuk menggunakan pengukuran nilai wajar pada laporan keuangan karena laporan yang dihasilkan dianggap menjadi lebih relevan untuk keputusan investor dan kreditur dibandingkan informasi yang menggunakan pengukuran berbasis akuntansi biaya historis (*historical cost*). Diperkirakan bahwa penyebab masalah perbankan pada tahun 1980-1990an yang terjadi di Amerika Serikat dipicu oleh laporan keuangan yang tidak bergegas melaporkan kerugian sehingga, memunculkan kesepakatan bahwa akuntansi berbasis biaya historis perlu direkonstruksi ulang (Fajriana dan Aviyanti, 2019).

Selaras dengan Fajriana dan Aviyanti (2019), Evans, dkk (2014) menyatakan bahwa pengukuran nilai wajar dapat memprediksi *earnings* akuntansi pada masa depan dan juga menunjukkan bahwa informasi *forward-looking* termasuk pengukuran nilai wajar telah menghasilkan jumlah neraca (*yields balance sheet amounts*) yang dapat memprediksi realisasi relatif kinerja keuangan dimasa depan dan relatif mampu memprediksi efek atau pengaruh penerapan pengukuran nilai wajar terhadap relevansi nilai (*value relevance*). Dengan demikian, pengukuran nilai wajar dianggap oleh beberapa peneliti

telah mampu memberikan kontribusi untuk menyajikan informasi yang relevan dan berguna bagi keputusan investasi investor dan *stakeholders* lainnya serta mampu menekan fenomena asimetri informasi.

Penelitian terdahulu oleh Fontes, dkk (2018) yang menemukan bukti bahwa *fair value measurement* memiliki manfaat bagi laporan keuangan. Temuannya setelah menguji sampel aset bank di Eropa yang telah mengadopsi IFRS (*International Financial Reporting Standards*) menunjukkan bahwa *fair value measurement* aset dikaitkan dengan asimetri informasi yang jauh lebih rendah dan penurunan ini lebih dari dua kali lipat ketika bank juga mengakui OCR (*own credit risk*). Penelitian lain oleh Attawalbeh (2020) dengan menguji sampel bank di Yordania menemukan bukti bahwa akuntansi nilai wajar memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap asimetri informasi di bank Yordania. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pengukuran nilai wajar memberikan data yang lebih relevan dan tepat kepada pemangku kepentingan dan mencerminkan nilai informasional kepada *stakeholders*.

Namun demikian, nampaknya penerapan konsep nilai wajar oleh *standard-setters* tidak lepas dari pertentangan beberapa peneliti lain. Pihak yang menentang penerapan pengukuran nilai wajar mengungkapkan bahwa FVM dapat menciptakan volatilitas laba tanpa perlu meningkatkan informasi yang relevan. Perkiraan *fair value measurement* (FVM) melibatkan subjektivitas yang tinggi dan FVM juga melibatkan manajer dengan diskresi yang besar serta manajer bisa menggunakan kesempatan diskresionari tersebut ketika melaporkan laba perusahaan (Nissim, 2003).

Hal ini juga selaras dengan pendapat Krumwiede (2008) yang menyatakan bahwa walaupun pengukuran nilai wajar memiliki tujuan yang baik, namun pengukuran nilai wajar dapat menjadikan manajemen memiliki estimasi yang salah karena nilai wajar dapat berlandaskan pada perkiraan dan asumsi yang kurang tepat serta jika manajer diasumsikan memiliki sikap oportunistik maka manajer dapat memperoleh keuntungan dari penilaian dan prakira yang dipakai pada tahap manipulasi data dengan cara mengelola angka nilai akuntansi agar sesuai dengan tujuan pribadi yaitu, angka laba yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan dari *fair value measurement* dapat disalahgunakan dan menimbulkan terjadinya *fraud*.

Sodan (2015) juga mengungkapkan hal yang sama dengan membuktikan bahwa ANW (akuntansi nilai wajar) tidak sepenuhnya baik terutama pada negara dengan kondisi pasar yang kurang likuid. Sodan (2015) menguji sampel pada perusahaan dan perbankan di 17 negara di Eropa Timur yang tercatat di Amadeus, *Worldscope and Bankscope* pada tahun 2000 sampai 2011 menunjukkan hasil bahwa pendapatan yang diukur dengan ANW memiliki kualitas agregat yang rendah, keuntungan (kerugian) bersih yang dilaporkan pada aset dengan ANW melalui laporan laba rugi bank kurang dalam menjelaskan variasi ukuran kualitas laba. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa ANW tidak selamanya sesuai diterapkan dalam segala kondisi pasar aset.

Di Indonesia sendiri pengukuran nilai wajar (*fair value measurement*) diatur dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 68 yang

berlaku efektif tanggal 1 Januari 2015. Sejak 5 tahun terakhir masih sedikit ditemukan literatur terkait dengan implementasi pengukuran nilai wajar terhadap tingkat asimetri informasi. Penelitian dari literatur di Indonesia masih berfokus pada tahap implementasi dari pengukuran nilai wajar itu sendiri. Beberapa penelitian yang menguji implementasi nilai wajar di Indonesia diantaranya adalah Khomsatun (2016) dengan menggunakan data perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI menemukan bukti bahwa, tidak ada peningkatan daya banding laporan keuangan untuk kebijakan akuntansi yang diwajibkan menggunakan pengukuran nilai. Sejalan dengan penelitian Pratiwi dan Siswantoro (2017) yang menunjukkan bahwa nilai wajar tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Akan tetapi, ketika nilai wajar dibagi berdasarkan hierarkinya, hasil penelitian menyatakan bahwa hanya nilai wajar 2 dan 3 yang memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian lain dilakukan oleh Geraldina (2018) untuk menguji pengaruh nilai wajar aset keuangan terhadap kandungan informasi laba masa depan bank dengan menggunakan analisis data panel menemukan bukti bahwa kandungan informasi laba masa depan bank telah meningkat setelah penerapan wajib PSAK 50 dan 55, tetapi penggunaan nilai wajar aset keuangan telah mengurangi kandungan informasi laba bank di masa depan. Ketiga penelitian yang dilakukan di Indonesia di atas menyimpulkan bahwa implementasi pengukuran nilai wajar di Indonesia tampaknya belum memberikan dampak positif yang signifikan. Hal ini semakin rumit karena masih banyaknya ditemukan pro dan kontra dari penerapan pengukuran nilai wajar ini.

Salah satu yang paling membuat penerapan pengukuran nilai wajar mendapat respon negatif dikarenakan *fair value measurement* dituding sebagai salah satu penyebab munculnya krisis keuangan yang dipicu oleh *subprime mortgage* pada semester II tahun 2008. *Fair Value* sempat dijadikan kambing hitam. Sistem akuntansi atau pelaporan keuangan yang menggunakan *fair value* dianggap sebagai penyebab terjadinya krisis keuangan tersebut. Meskipun tudingan itu telah dibantah oleh tim yang dibentuk oleh *Security Exchange Commission* (SEC), tim dari Negara-negara dalam G-20 dan tim dari IMF yang melakukan kajian yang sama, hasil penyelidikan menyebutkan bahwa krisis tidak disebabkan oleh laporan keuangan yang menggunakan nilai wajar melainkan karena adanya pengambilan resiko yang terlalu besar dan kegagalan perbankan atau lembaga-lembaga keuangan di Amerika Serikat dalam mengantisipasi *probable credit losses*, keraguan atas kualitas aset dan turunnya kepercayaan kreditur maupun investor (Sukendar, 2012).

Penelitian ini berfokus pada industri perbankan tidak hanya karena tudingan bahwa *fair value* sebagai penyebab krisis keuangan seperti yang dijelaskan di atas melainkan karena sektor perbankan di Indonesia sudah diwajibkan untuk menerapkan perhitungan nilai wajar secara menyeluruh dan komprehensif. Selain itu, alasan penelitian menguji sampel pada sektor perbankan karena konsep pengukuran nilai wajar sulit diterapkan di Indonesia, khususnya pada sektor perbankan. Perbankan dianggap belum siap untuk penerapan nilai wajar secara menyeluruh. Hal ini diungkapkan oleh Jusuf Wibisana mantan ketua DSAK. Menurut pendapatnya dibandingkan dengan

sektor lain, dimatinya penerapan pengukuran nilai wajar pada sektor perbankan tergolong paling rumit dan kompleks. Sebab tak semua instrumen keuangan atau aset bank diperdagangkan di pasar modal (Sukendar 2012). Maka dari itu, peneliti menggunakan sampel sektor perbankan agar dapat memberikan informasi mengenai implementasi nilai wajar secara lebih menyeluruh.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian pendahulunya, terkhusus penelitian di Indonesia yang masih berfokus menguji tentang implementasi pengukuran nilai wajar saja atau berfokus pada dampak penerapan pengukuran nilai wajar terhadap kualitas laba yang dihasilkan secara menyeluruh dan belum berfokus pada aspek asimetri informasinya. Sedangkan menurut Lestari dan Wirawati (2016) menyatakan bahwa manajemen laba timbul dari dua kesulitan pengendalian, yaitu pengendalian asimetri informasi dan masalah lembaga yang terjadi ketika kepemilikan ekuitas dipisahkan oleh korporasi. Penelitian ini lebih menitikberatkan penelitiannya kepada sejauhmana penerapan pengukuran nilai wajar mempengaruhi tingkat asimetri informasi. Hal ini dikarenakan asimetri informasi adalah salah satu pemicu munculnya masalah agensi yang memungkinkan manajemen perusahaan melakukan berbagai jenis *fraud* yang dapat merugikan kepentingan dari para *stakeholdernya*. Hal inilah yang membuat peneliti memfokuskan penelitian kepada pengaruh penerapan pengukuran nilai wajar terhadap asimetri informasi khususnya pada sektor perbankan. Selain itu, peneliti juga menggunakan *good corporate governance* sebagai variabel moderasi.

Good corporate governance yang merupakan konsep dari tata kelola perusahaan setiap tahunnya juga terus mengalami kemajuan dan penerapannya menjadi perhatian para *stakeholders*. Seperti halnya konsep *fair value measurement*, *good corporate governance* juga muncul sebagai konsep tata kelola perusahaan yang mencoba mengontrol agar perusahaan dapat bertindak lebih transparan dan bertanggungjawab dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sehingga, data yang disajikan dan dipublikasikan memiliki kandungan informasi yang transparan, relevan, bertanggungjawab dan tepat waktu serta memperlakukan investor maupun pemangku kepentingan lainnya secara adil dan setara dengan penyebaran informasi yang merata dan tidak hanya menguntungkan salah satu pemangku kepentingan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Lisa (2012) yang membuktikan bahwa asimetri informasi yang muncul sebagai akibat dari adanya hubungan antara *principal* dan *agent* dapat ditekan dengan adanya *corporate governance* yang baik. *Good corporate governance* dianggap dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran dari pelaporan keuangan suatu entitas.

Penelitian ini mengacu pada sejauh mana bank mengukur aset keuangan berdasarkan nilai wajar (kelengkapan aset/*assets completeness*) sebagai proksi dari *fair value measurement*. Bank dengan kelengkapan aset yang lebih tinggi memiliki asimetri informasi yang rendah yang dibuktikan dengan nilai *bid-ask spread* (proksi asimetri informasi) yang rendah. Semakin besar tingkat kelengkapan aset, maka semakin tinggi pula tingkat informasi

yang relevan yang dibutuhkan oleh investor dalam proses pengambilan keputusan mereka dapat tersaji pada laporan keuangan. Kemudian peneliti memeriksa tingkat *good corporate governance* bank memoderasi hubungan *fair value measurement* pada asimetri informasi. Hal ini dikarenakan prinsip dari *good corporate governance* yang menekankan pada sikap transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian dan kewajaran dalam pengelolaan perusahaan. Diharapkan dengan semakin baik tingkat *good corporate governance*, informasi yang disajikan oleh perusahaan melalui laporan keuangan menjadi lebih bertanggungjawab dengan menyediakan informasi yang berguna bagi investor tanpa ada sikap oportunistik. Sehingga, informasi nilai wajar yang disajikan lebih relevan dan asimetri informasi menurun.

Oleh karena itu, peneliti juga tertarik untuk melihat bagaimana tingkat *good corporate governance* suatu entitas dapat memperkuat hubungan antara penerapan pengukuran nilai wajar dengan tingkat asimetri informasi. Berdasarkan teori serta penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas, maka penulis mengajukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Pengukuran Nilai Wajar Aset Bank Terhadap Asimetri Informasi yang Dimoderasi oleh *Good Corporate Governance* (Studi Empiris pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan dari pengukuran nilai wajar aset bank berpengaruh terhadap tingkat asimetri informasi pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?
2. Apakah *corporate governance* mampu memperkuat hubungan antara pengukuran nilai wajar terhadap tingkat asimetri informasi pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menemukan bukti empiris apakah penerapan pengukuran nilai wajar aset bank dapat menurunkan tingkat asimetri informasi pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
2. Menemukan bukti empiris apakah *corporate governance* mampu memperkuat hubungan antara pengukuran nilai wajar terhadap tingkat asimetri informasi pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan atau berkepentingan, diantaranya adalah:

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan peneliti tentang implementasi penerapan pengukuran nilai wajar dan bagaimana hubungannya dengan tingkat asimetri informasi

serta menambah wawasan tentang bagaimana *good corporate governance* dapat memoderasi hubungan antara kedua variabel tersebut pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Perbankan

Bagi perbankan sebagai objek penelitian ini diharapkan hasil dari penelitian dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam penerapan pengukuran nilai wajar aset serta pertimbangan terkait dengan implementasi konsep *corporate governance* agar penerapan dari pengukuran nilai wajar dapat dioptimalkan lagi.

3. Bagi Akademis

Bagi akademis diharapkan penelitian ini dapat menambah literatur dan ilmu pengetahuan tentang pengaruh penerapan pengukuran nilai wajar terhadap tingkat asimetri informasi serta bagaimana peran *corporate governance* dalam memoderasi keduanya, sehingga penelitian ini dapat menjadi masukan serta pertimbangan dalam penelitian-penelitian serupa di masa depan.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Theory*)

Teori pemangku kepentingan dipopulerkan oleh Freeman & McVea (1984) yang mengemukakan terkait kepada pihak mana sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab sebagai sebuah entitas bisnis. Teori *stakeholders* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan, namun juga harus memberi manfaat bagi *stakeholders* mereka. Teori *stakeholders* juga menyatakan bahwa semakin kuat hubungan antara *stakeholders* dengan organisasi akan semakin kuat pula sebuah perusahaan dapat bertahan. Oleh karena itu, kepentingan para *stakeholders* juga harus diakomodir oleh perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa para *stakeholders* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberadaan perusahaan untuk pencapaian tujuan dan keberlanjutan perusahaan dimasa depan (Suwandi, Arifianti & Rizal, 2018).

Stakeholders merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau perhatian khusus pada permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan prospek dan risiko masa depan perusahaan. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dikatakan *stakeholders* merupakan keterikatan yang didasari oleh kepentingan tertentu. Sehingga apabila berbicara terkait dengan *stakeholders theory* berarti membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak yang saling mempengaruhi (Nur dan Priantinah, 2012). Salah satu dari pihak *stakeholders* adalah investor. Teori

pemangku kepentingan menyatakan bahwa hubungan antara perusahaan sebagai sebuah entitas memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas terhadap *stakeholders*.

Salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan dalam rangka memberikan manfaat bagi para *stakeholders* adalah dengan memberi dan menyajikan informasi yang relevan sehingga dapat berdaya guna. Informasi akuntansi merupakan salah satu kebutuhan bagi para *stakeholders* dalam mengambil alternatif-alternatif terbaik dalam keputusan ekonomi. Informasi yang relevan, transparan dan tepat waktu dapat berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan *stakeholders* dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menyajikan informasi yang relevan dan tepat waktu serta dipublikasikan dengan transparan diharapkan dapat menghindari munculnya fenomena asimetri informasi dimana, dampak dari fenomena ini cenderung merugikan pihak pemangku kepentingan eksternal perusahaan seperti investor.

Teori pemangku kepentingan menjadi dasar bagi *standard-setter* dalam merumuskan regulasi akuntansi guna mampu melindungi investor sebagai salah satu bagian utama dari *stakeholders*. Sebagaimana tujuan utama pelaporan keuangan dalam kerangka konseptual FASB yaitu, pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para investor dan kreditur dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial dalam membuat keputusan investasi, kredit dan sebagainya yang rasional (Suwardjono, 2014). Penerapan pengukuran nilai wajar merupakan salah

satu upaya *standard-setters* untuk melindungi investor dengan menyajikan informasi yang lebih relevan dan berdaya guna dalam pengambilan keputusan. Teori pemangku kepentingan juga menjadi dasar dalam pengembangan konsep tata kelola perusahaan. Dimana, *good corporate governance* menekankan pada prinsip keterbukaan, rasa tanggungjawab serta perlakuan yang setara terhadap pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menyediakan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan guna memenuhi kebutuhan informasi investor dan mampu memberikan manfaat.

2. Pengertian Asimetri Informasi

Asimetri informasi muncul sebagai akibat adanya perbedaan tingkat informasi yang dapat diterima oleh salah satu pihak yang berkepentingan, yang umumnya dikenal sebagai pihak prinsipal (pemangku kepentingan eksternal seperti investor atau kreditur) dan pihak agen (manajemen perusahaan). Menurut Scott (2015) menyatakan bahwa “*some parties to business transaction advantage over others may take actions that are unobservable to others.*”

Berdasarkan pengertian Scott (2015) di atas, menjelaskan bahwa terjadinya fenomena asimetri informasi mengindikasikan adanya ketidakseimbangan informasi yang diterima oleh kedua pihak yang berkepentingan terhadap informasi keuangan perusahaan. Sehingga salah satu pihak memiliki keunggulan dan kelebihan informasi dan pihak lainnya memiliki kelemahan karena kurangnya akses untuk mendapatkan informasi

yang dibutuhkan sehingga dapat merugikan dalam proses pengambilan keputusan terkait investasi dana mereka.

Dalam kasus asimetri informasi di bidang bisnis, umumnya yang memiliki keunggulan informasi adalah pihak manajemen perusahaan sedangkan pihak yang berkepentingan seperti investor memiliki akses yang terbatas terhadap informasi perusahaan yang mencakup prospek dan risiko dimasa yang akan datang. Keadaan dimana manajemen yang mengetahui lebih banyak informasi terkait prospek dan risiko usaha yang sebenarnya dibanding dengan pemegang saham mengindikasikan bahwa, telah terjadi penguasaan informasi yang berbeda (*asymmetric information*).

3. Jenis Asimetri Informasi

Dalam bukunya, Scott (2015) membagi asimetri informasi menjadi dua jenis berdasarkan bagaimana suatu pihak memiliki informasi yang lebih unggul daripada pihak lainnya. Adapun kedua jenis asimetri informasi tersebut adalah:

a. Advers Selection

Adverse selection is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, have an information advantage over other parties (Scott, 2015). Advers selection adalah jenis asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa

adanya salah satu pihak yang unggul dan diuntungkan atas informasi dibandingkan pihak lainnya.

Adversers selection terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan pihak-pihak dalam (*insiders*) lainnya lebih mengetahui kondisi kini atau prospek perusahaan kedepannya serta risiko dari suatu perusahaan daripada pihak luar (investor dan kreditor). Ketidakseimbangan informasi yang diterima oleh *stakeholders* perusahaan ini dapat menimbulkan masalah dalam transaksi pasar modal karena investor tidak mempunyai informasi yang cukup dalam pengambilan keputusan investasinya.

b. Moral Hazard

Moral hazard is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a contract can observe their actions in fulfillment of the contract but other parties cannot (Scott, 2015). *Moral hazard* adalah jenis asimetri informasi dimana satu pihak yang akan melangsungkan transaksi usaha atau bisnis dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi mereka sedangkan pihak-pihak lainnya tidak (pihak eksternal).

Moral hazard dapat terjadi karena adanya pemisahan pemilikan dengan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar. Adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian sebagai akibat dari pendelegasian tugas dan wewenang dari pemilik (prinsipal) ke pengelola (agen) perusahaan tetapi, pihak prinsipal disini disebut sebagai investor

tidak dapat sepenuhnya memantau manajer dalam pelaksanaan pendelegasian wewenang tersebut.

Informasi akuntansi yang berkualitas merupakan hal yang penting untuk menurunkan tingkat asimetri informasi. Tingginya tingkat asimetri informasi mengindikasikan bahwa pengelolaan tatakelola perusahaan belum dilakukan dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya asimetri informasi menyebabkan *stakeholders* sebagai pihak eksternal yang berkepentingan tidak dapat mengamati dan mengawasi seluruh kinerja perusahaan yang meliputi prospek dan risiko dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, keberadaan dari asimetri informasi ini dipercaya sebagai penyebab dari timbulnya praktek manajemen laba (*earning management*).

Richardson (1998) berpendapat bahwa terdapat sebuah hubungan sistematis antara besarnya asimetri informasi dengan tingkat manajemen laba. Fleksibilitas manajemen untuk *manage earning* dapat dikurangi dengan menyediakan informasi akuntansi yang lebih berkualitas bagi pengguna eksternal dengan menekan tingkat asimetri informasi.

4. Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Proses Pengambilan Keputusan *Stakeholders*

Informasi merupakan salah satu komoditas yang kompleks dan merupakan sumber daya yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan individu. Sebagaimana dinyatakan oleh teori keputusan, investor akan mengumpulkan semua informasi yang ada sebanyak dan selengkap mungkin sebelum mengambil tindakan. Akan tetapi, adanya fenomena

asimetri informasi membuat investor sebagai salah satu *stakeholder* yang berkepentingan tidak dapat mengetahui semua informasi yang dibutuhkan sehingga tindakan yang diambil tidak sepenuhnya tepat (Sutedja, 2006). Hal ini akan mempengaruhi keputusan investasi dari investor. Sebagai contoh seorang investor memerlukan informasi yang relevan untuk membuat keputusan investasi mereka apakah harus *buy*, *hold*, atau *sell*. Jika seluruh informasi yang ada dipublikasikan, seharusnya investor tersebut mengambil tindakan *buy*. Namun, karena adanya fenomena asimetri informasi menyebabkan investor mengambil tindakan *hold*. Hal ini jelas merugikan investor mengingat tidak optimalnya keputusan yang mereka buat. Hal ini tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri. Tetapi, juga dapat mempengaruhi keadaan pasar.

Selain fenomena yang dijelaskan di atas, biasanya juga ditemukan adanya kasus orang dalam perusahaan (pihak *insider*) yang malah memanfaatkan keunggulan informasi mereka itu untuk kepentingannya sendiri, seperti melakukan *insider trading*. Hal tersebut sangat merugikan perusahaan sebab para investor akan kehilangan kepercayaan akibat adanya asimetri informasi dalam perusahaan tersebut. Asimetri informasi juga menyebabkan investor tidak dapat mengetahui secara pasti prospek dan risiko yang akan ditimbulkan dari keputusan investasi yang mereka buat.

Disamping itu, seorang investor yang *rational risk-averse* selalu mempertimbangkan setiap risiko investasi yang ada. Akibatnya timbul keraguan yang pada akhirnya membuat investor enggan untuk berinvestasi

pada perusahaan yang memiliki tingkat asimetri informasi yang tinggi. Di sisi lain, perusahaan tentu saja menginginkan tambahan dana yang berasal dari investor luar (misalnya untuk melakukan ekspansi). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan individu. Hal itu tidak terlepas dari *nature* informasi yang sangat penting. Adanya informasi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang terlibat dan adanya ketidakpastian yang menimbulkan ketidakjelasan risiko dan manfaat investasi. Untuk itulah, diperlukan upaya untuk mengurangi bahkan menghilangkan asimetri informasi.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi asimetri informasi adalah dengan melakukan pengungkapan (*disclosure*) atas laporan keuangannya (Sutedja, 2006). Selain dengan pengungkapan atas laporan keuangan menurut Lisa (2012) asimetri informasi yang muncul sebagai akibat dari adanya hubungan antara *principal* dan *agent* dapat ditekan dengan adanya *corporate governance* yang baik. Sedangkan Fontes, dkk (2018) dan Attawalbeh (2020) membuktikan bahwa penggunaan pengukuran nilai wajar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat asimetri informasi. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat asimetri informasi dapat diminimalisir dengan menggunakan pengukuran nilai wajar.

Berkurangnya risiko asimetri informasi ini dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan bagi investor untuk melakukan investasi pada sekuritas perusahaan publik tertentu. Dengan demikian, investor akan memberikan kepercayaan yang lebih tinggi kepada perusahaan yang

memberikan informasi yang lengkap, transparan dan relevan dibandingkan dengan perusahaan yang cenderung tidak mengungkapkan semua informasi yang relevan dan lengkap.

5. Pengukuran Nilai Wajar (*Fair Value Measurement*)

Menurut PSAK 68/IFRS 13 nilai wajar (*fair value*) adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Sedangkan menurut Suwardjono (2014) *fair value* adalah jumlah rupiah yang disepakati untuk suatu objek dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang berkehendak bebas tanpa tekanan atau keterpaksaan. Dengan merujuk pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa *fair value* merupakan harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk melunasi suatu kewajiban dalam transaksi yang teratur antara pihak-pihak yang berkehendak bebas tanpa adanya tekanan atau keterpaksaan pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar (*fair value measurement*) menjadi salah satu alternatif yang ditawarkan oleh *standard-setters* dalam mengatasi adanya asimetri informasi. *Fair value measurement* (FVM) diyakini dapat menyajikan informasi yang lebih informasional dan relevan bagi pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan pengukuran akuntansi berbasis biaya historis yang dianggap tidak mampu menyajikan informasi yang relevan. Biaya historis dituding sebagai penyebab masalah perbankan pada tahun 1980-1990an yang terjadi di Amerika Serikat karena pada laporan

keuangan yang tidak bergegas melaporkan kerugian sehingga memunculkan kesepakatan bahwa, akuntansi berbasis biaya historis perlu direkonstruksi ulang (Fajriana dan Aviyanti, 2019).

PSAK 68 menetapkan hirarki nilai wajar yang mengelompokkan input untuk teknik penilaian yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar menjadi tiga level input, yaitu:

1. Input Level 1 adalah harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran,
2. Input Level 2 adalah input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
3. Input Level 3 adalah input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

Berdasarkan PSAK No. 68 tahun 2013 tentang Pengukuran Nilai Wajar, adapun teknik penilaian nilai wajar adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Pasar (*Market Approach*)

Pendekatan pasar (*market approach*) menggunakan harga dan informasi relevan lain yang dihasilkan oleh transaksi pasar yang melibatkan aset, liabilitas, atau kelompok aset dan liabilitas yang identik atau serupa seperti bisnis.

2. Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)

Pendekatan biaya (*cost approach*) mencerminkan jumlah yang dibutuhkan saat ini untuk menggantikan kapasitas manfaat (*service capacity*) aset atau sebagai biaya pengganti saat ini.

3. Pendekatan Penghasilan (*Income Approach*)

Pendekatan penghasilan (*income approach*) mengkonversi jumlah masa depan (contohnya arus kas atau penghasilan dan beban) ke suatu jumlah tanggal saat ini yang didiskontokan. Ketika pendekatan penghasilan digunakan, pengukuran nilai wajar mencerminkan harapan pasar saat ini mengenai jumlah masa depan tersebut.

Namun demikian, meskipun nilai wajar (*fair value*) dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan dari *historical cost* masih saja terdapat adanya pertentangan dari peneliti-peneliti lainnya dengan menyebutkan adanya kelemahan *fair value*. Menurut Tim Krumwiede (2008) terdapat beberapa kritik penting terhadap *fair value* yaitu:

1. Meskipun bermaksud baik namun perkiraan manajemen tentang *fair value* bisa menjadi salah pada luas berbagai prediksi dan asumsi yang salah.
2. Oportunistik dan ketidakjujuran manajemen dapat mengambil keuntungan dari penilaian dan estimasi yang digunakan dalam proses manipulasi dan mengurutkan angka pada hasil dalam angka pendapatan yang diinginkan.

Sedangkan dari pihak yang mendukung penerapan nilai wajar mengungkapkan beberapa kelebihan dari pengukuran nilai wajar seperti

yang dikemukakan oleh Penman (2007;33) dalam Wilestari dan Afriani (2019) sebagai berikut:

1. Investor-investor berkaitan dengan nilai (*value*) bukan biaya maka melaporkan *fair value*.
2. Dengan berlalunya waktu harga historis jadinya tidak relevan didalam menaksir posisi keuangan suatu entitas.
3. Akuntansi *fair value* melaporkan aset dan kewajiban dalam cara yang ekonomis akan memperhatikan mereka, *fair value* mencerminkan unsur pokok ekonomi yang benar.
4. Akuntansi *fair value* melaporkan *economic income*: seturut diterima secara luas defenisi Hicksian dari pendapatan sebagai perubahan dalam kekayaan, perubahan dalam *fair value* dari aset bersih pada neraca menghasilkan pendapatan. Akuntansi *fair value* adalah solusi kepada permasalahan akuntan dalam pengukuran pendapatan dan lebih disukai dibandingkan ratusan peraturan yang mendasari pendapatan *historical cost*.
5. *Fair value* adalah pengukuran berbasis pasar yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor khusus untuk entitas tertentu; secara setimpal itu menunjukkan satu pengukuran yang tidak bisa konsisten dari periode ke periode dan lintas entitas.

Dalam penelitian ini menggunakan proxy *assets completeness* yang dikelompokkan lagi menjadi dua proxy, yaitu *FVNItoEarnAssets* dan *FVNItoMVAssets* untuk mengukur *fair value measurement* (FVM). Hal ini

dikarenakan merujuk dan konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa *proxy fair value net income* (FVNI) lebih informatif daripada pendapatan komprehensif lainnya (OCI) dalam mengukur *fair value measurement* aset.

6. Konsep *Good Corporate Governance*

Good corporate governance (GCG) mulai diterapkan di Indonesia semenjak terjadinya krisis moneter yang dialami oleh Indonesia dan menghancurkan perekonomian nasional pada tahun 1998. Perusahaan-perusahaan di Indonesia banyak yang mengalami kebangkrutan karena tidak dapat bertahan menghadapi krisis keuangan yang melanda. Karena terlalu banyak perusahaan mengalami kebangkrutan, pemerintah mengambil tindakan yaitu restrukturisasi dan rekapitulasi. Dengan melakukan tindakan ini, pemerintah menunjukkan bahwa kurangnya kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi serta memiliki kinerja yang buruk (Halimatusadiah, 2015) dalam (Setyanto dan Sahetapy, 2018).

Kejadian krisis ekonomi tersebut membuat pemerintah Indonesia menyadari bahwa perlu adanya penerapan *good corporate governance* dalam dunia usaha. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan bisa menjadi nilai tambah bagi perusahaan sehingga jika kinerja perusahaan dapat meningkat akan berdampak pada kesejahteraan manajemen perusahaan dan pemegang saham (*shareholders*).

Definisi *good corporate governance* menurut Irwondy dan Hubeis (2016) *good corporate governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik menjelaskan hubungan antara berbagai unsur dalam perusahaan yang menentukan kinerja perusahaan. Konsep GCG digunakan agar pihak perusahaan lebih bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya dengan menjunjung kepentingan para *shareholders* (pemegang saham) sebagai pihak prinsipal. *Corporate Governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer sebagai pihak agen akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan menggelapkan atau menginvestasikan dana yang telah ditanamkan oleh investor ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan (proyek berisiko), dan juga berkaitan dengan bagaimana cara investor mengontrol manajer dalam menjalankan tugasnya (Kurniyawati, 2019).

Pada dasarnya lahirnya konsep GCG ini berkaitan dengan teori keagenan yang dibahas sebelumnya. Dimana, kita tahu teori keagenan membahas mengenai hubungan antara pihak *principal* dan *agent*. Dalam hubungannya dengan *corporate governance* teori tersebut memiliki pandangan bahwa manajemen perusahaan sebagai pihak agen bagi pemegang saham, akan bertindak dengan kesadaran penuh untuk kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijak dan bijaksana serta adil bagi pemegang saham. Hal ini didasarkan atas adanya perilaku *self interest*.

Dalam perkembangan selanjutnya, menurut Kurniyawati (2019) *agency theory* menerima respon yang lebih luas karena dianggap mencerminkan kenyataan. Berbagai gagasan mengenai *corporate governance* telah dikembangkan dengan mengandalkan teori keagenan di mana manajemen dilakukan dengan kepatuhan penuh berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut akan menimbulkan masalah keagenan yang berdampak pada terjadinya kesenjangan informasi atau lebih dikenal dengan istilah asimetri informasi. Masalahnya bisa diatasi dengan pelaksanaan *good corporate governance* yang efektif dan efisien.

7. Prinsip-prinsip *good corporate governance*

Secara prinsip terdapat 5 prinsip utama dari *Good Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai berikut (Sari, Al Musadieg, & Sulisty, 2018):

1. **Transparansi (*transparancy*)**, prinsip ini menekankan pada sikap keterbukaan dari pihak manajemen perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dan keterbukaan dalam menyediakan informasi yang relevan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip Transparansi pada pelaksanaannya dalam sebuah perusahaan yaitu dengan tersedianya pengungkapan yang tepat waktu, informasi yang jelas dan dapat dibandingkan berdasarkan kinerja keuangan perusahaan, tata kelola perusahaan, kepemilikan perusahaan. Informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada *stakeholders* seharusnya adalah informasi yang

benar dan memberikan interpretasi yang baik untuk para *stakeholders* dan bukan informasi yang menyesatkan.

2. Akuntabilitas (*accountability*), prinsip ini menegaskan pada kejelasan fungsi, implementasi dan pertanggungjawaban divisi-divisi perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dilakukan secara efektif dan efisien. Akuntabilitas berfokus pada penciptaan sistem pengawasan (*control*) yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara dewan komisaris, dewan direktur, pemegang saham, dan auditor. Kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan akuntabilitas untuk kinerja organ perusahaan harus diatur dengan tepat, terukur dan sesuai dengan kepentingan pemangku kepentingan sehingga manajemen perusahaan berjalan efektif.
3. Responsibilitas (*responsibility*), prinsip ini fokus pada kesesuaian di dalam pengelolaan hukum dan peraturan perusahaan dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Perusahaan sebagai sebuah entitas juga harus melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga kelangsungan bisnis terjadi dalam jangka panjang serta mendapat pengakuan sebagai (*Good Corporate Governance*).
4. Kemandirian (*Independency*), prinsip ini menekankan pada keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh/tekanan/intervensi dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Perusahaan yang dikelola secara independen memastikan

bahwa masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Prinsip ini memastikan bahwa masing-masing organ perusahaan menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan perundang-undangannya secara objektif.

5. Kewajaran (*Fairness*), prinsip ini fokus pada keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Secara sederhana kesetaraan atau kewajaran sebagai perlakuan adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip kewajaran ini harus menjamin adanya perlakuan yang setara terhadap semua pihak terkait terutama pemegang saham minoritas maupun asing.

8. *Corporate Governance Index*

Corporate governance index adalah proxy yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur *good corporate governance*. Di Indonesia, *corporate governance index* dapat diperoleh melalui riset yang dilakukan oleh IICD (*Indonesian Institute for Corporate Directorship*). Penelitian IICD menggunakan *corporate governance scorecard* yang dikembangkan dari *International Standard Code on GCG* dari *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD).

Nilai indeks *corporate governance* perusahaan yang diukur diklasifikasikan ke dalam empat tingkatan, yaitu:

1. Nilai 90-100%

Rentang nilai ini masuk ke dalam kriteria *excellent*. Kriteria ini mengindikasikan bahwa perusahaan telah memenuhi standar internasional GCG-code yang diumumkan oleh OECD sebagaimana tercantum dalam *scorecard*.

2. Nilai 80–89%

Rentang nilai ini masuk ke dalam kriteria *good*. Kriteria ini mengindikasikan bahwa perusahaan telah memenuhi lebih dari persyaratan peraturan minimum dan kurang dari standar internasional GCG-code yang tercantum dalam *scorecard* dan menunjukkan komitmen positif untuk praktek tata kelola perusahaan yang baik.

3. Nilai 60-79 %

Rentang nilai ini masuk ke dalam kriteria *fair*. Kriteria ini mengindikasikan bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan peraturan minimum.

4. Nilai kurang dari 60%

Rentang nilai ini masuk ke dalam kriteria *poor*. Kriteria ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak memenuhi persyaratan peraturan minimum dan tidak menunjukkan komitmen yang cukup untuk praktek tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Adapun penilaian dilakukan berdasarkan pada informasi yang tersedia di publik, antara lain laporan keuangan tahunan, laporan keuangan audit, laporan berkelanjutan, pengumuman dan panggilan rapat pemegang

saham tahunan/luar biasa serta *website* perusahaan. Sedangkan instrumen penilaian yang digunakan oleh IICD yang mengacu pada prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikembangkan oleh OECD dikutip dari Putra, dkk (2006) antara lain:

1. Hak-hak pemegang saham dan fungsi-fungsi penting kepemilikan saham.

Prinsip *corporate governance* yang pertama dari OECD pada dasarnya mengatur mengenai hak-hak pemegang saham dan fungsi-fungsi kepemilikan saham. Hal ini terutama mengingatkan investor saham dari suatu perusahaan publik memiliki hak-hak khusus seperti, saham tersebut dapat dibeli, dijual ataupun ditransfer. Pemegang saham tersebut juga berhak atas keuntungan perusahaan sebesar porsi kepemilikannya. Selain itu kepemilikan atas suatu saham mempunyai hak atas semua informasi perusahaan dan mempunyai hak untuk mempengaruhi jalannya perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Perlakuan yang setara terhadap pemegang saham perusahaan.

Pada prinsip kedua ini ditekankan perlunya persamaan perlakuan kepada seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Prinsip ini menekankan pentingnya kepercayaan investor di pasar modal. Pada praktiknya pemegang saham utama perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk memberikan pengaruhnya dalam kegiatan operasional perusahaan. Dari praktik ini, seringkali transaksi yang terjadi memberikan manfaat hanya kepada pemegang saham utama atau bahkan untuk kepentingan direksi

dan komisaris. Sebagai upaya mencegah kemungkinan terjadinya usaha-usaha yang dapat merugikan kepentingan investor minoritas maupun asing maka, prinsip ini menyatakan bahwa untuk melindungi investor perlu suatu informasi yang jelas mengenai hak dari pemegang saham. Seperti hak untuk memesan efek terlebih dahulu dan hak pemegang saham utama untuk memutuskan suatu keputusan tertentu dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika suatu saat terjadi pelanggaran atas hak pemegang saham tersebut.

3. Peran pemangku kepentingan.

Prinsip OECD ketiga membahas mengenai peranan *Stakeholders* dalam *Corporate Governance (CG)*. Secara umum, prinsip ini menyatakan bahwa kerangka *corporate governance* harus mengakui hak *stakeholders* dan menciptakan hubungan kerjasama yang aktif untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan yang bekesinambungan (sustainibilitas) dari kondisi keuangan perusahaan yang dapat diandalkan. Pernyataan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: para pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti investor, karyawan, kreditur dan pemasok memiliki sumberdaya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sumberdaya yang dimiliki oleh *stakeholder* tersebut harus dialokasikan secara efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kompetisi perusahaan dalam jangka panjang. Alokasi yang efektif dapat dilakukan dengan cara memelihara dan mengoptimalkan kerja sama para *stakeholder* dengan perusahaan. Hal tersebut dapat tercapai dengan

penerapan kerangka *corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan yaitu dengan adanya jaminan dari perusahaan tentang perlindungan kepentingan para pemangku kepentingan baik melalui perundang-undangan maupun perjanjian.

4. Pengungkapan dan transparansi.

Pada prinsip keempat ini ditegaskan bahwa kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan bahwa keterbukaan informasi yang tepat waktu dan akurat dilakukan atas semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan, termasuk di dalamnya keadaan keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan. Dalam rangka perlindungan kepada pemegang saham, perusahaan berkewajiban untuk melakukan keterbukaan (*disclosure*) atas informasi atau perkembangan yang material baik secara periodik maupun secara insidental. Pengalaman di banyak negara yang mempunyai pasar modal yang aktif menunjukkan bahwa keterbukaan menjadi alat yang efektif dalam rangka mempengaruhi perilaku perusahaan dan perlindungan investor. Keyakinan yang kuat di pasar modal dengan sendirinya akan menarik investor untuk menanamkan modalnya.

5. Tanggungjawab dewan komisaris dan direksi.

Prinsip GCG dari OECD yang terakhir berkaitan dengan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi perusahaan. Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa kerangka kerja tata kelola perusahaan harus memastikan pedoman strategis perusahaan dan monitoring yang efektif terhadap manajemen

oleh dewan, serta akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham. Berkaitan dengan adanya dua macam struktur pengawasan dan pengelolaan perusahaan di antara anggota OECD, yaitu *two tier boards* dan *unitary board*, prinsip ini secara umum dapat diterapkan baik pada perusahaan yang memisahkan fungsi dewan komisaris sebagai pengawas (*non-executive director*) dan dewan direksi sebagai pengurus perusahaan (*executive director*), maupun pada perusahaan yang menyatukan antara pengawas dan pengurus perusahaan dalam satu dewan. Menurut prinsip ini, tanggung jawab dewan yang utama adalah memonitor kinerja manajerial dan mencapai tingkat imbal balik (*return*) yang memadai bagi pemegang saham. Di lain pihak, dewan juga harus mencegah timbulnya benturan kepentingan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan di perusahaan. Agar dewan dapat menjalankan tanggung jawab tersebut secara efektif, maka dewan perlu dapat melakukan penilaian yang obyektif dan independen. Selain itu, tanggung jawab lain yang tidak kalah penting yaitu memastikan bahwa perusahaan selalu mematuhi ketentuan peraturan hukum yang berlaku, terutama di bidang perpajakan, persaingan usaha, perburuhan, dan lingkungan hidup. Dewan perlu memiliki akuntabilitas terhadap perusahaan dan pemegang saham serta bertindak yang terbaik untuk kepentingan mereka. Dewan juga diharapkan bertindak secara adil kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, seperti kepada

karyawan, kreditur, pelanggan, pemasok dan masyarakat sekitar perusahaan.

Dalam penelitian ini, *good corporate governance* diproksikan dengan *ASEAN Corporate Governance Scorecard* yang dinilai dan dipublikasikan oleh IICD (*Indonesian Institute for Corporate Directorship*) selama periode tahun 2017-2019. *ASEAN Corporate Governance Scorecard* diklasifikasikan hingga level 5 sebagai level tertinggi (kategori aset berkelas) dan dianggap layak untuk dilirik oleh investor global. Sedangkan untuk level terendah adalah level 0. Level 0 mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut belum mampu memenuhi standar minimum penilaian dan belum layak masuk klasifikasi *ASEAN Corporate Governance*.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil
1.	Fontes, J. C., Panaretou, A., & Peasnell, K. V (2018).	<i>The Impact of Fair Value Measurement for Bank Assets on Information Asymmetry and the Moderating Effect of Own Credit Risk Gains and Losses</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Independen : <i>Fair value measurement</i> • Dependen : <i>Information Asymmetry</i> • Moderasi : <i>Own credit risk (OCR)</i> • Kontrol : <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>ShareTurnover</i> 2. <i>Stock Return Volatility</i> 3. <i>Price</i> 4. <i>Country Bid-Ask Spread</i> 5. <i>FreeFloat</i> 6. <i>Tier 1 Capital</i> 7. <i>Size</i> 8. <i>Large Bank Indicator</i> 	Hasil penelitian ini menemukan bahwa <i>fair value measurement</i> aset dikaitkan dengan asimetri informasi yang jauh lebih rendah dan penurunan ini lebih dari dua kali lipat ketika bank juga mengakui OCR (<i>own credit risk</i>).
2.	Altawalbeh, M. A. F. (2020)	<i>The Impact of Fair Value Accounting on Information Asymmetry: Evidence from Jordanian Banking Sector</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Independen : <i>Fair Value Measurement</i> • Dependent : <i>Asimetri Informasi</i> • Kontrol : <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Return on Investment</i> 2. <i>Size</i> 	Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa nilai wajar memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap informasi asimetri di bank Yordania. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pengukuran nilai wajar memberikan data yang lebih akurat dan tepat kepada pemangku kepentingan dan mencerminkan nilai

			3. <i>Leverage</i>	informasional kepada investor
3.	Vergauwe, S., & Gaeremynck, A. (2019)	<i>Do Measurement-Related Fair Value Disclosures Affect Information Asymmetry?</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Independen : <i>Fair Value Disclosure</i> • Dependen : <i>Information Asymmetry and Price Impact.</i> • Kontrol : <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Auditfee</i> 2. <i>Volatility</i> 3. <i>Turnover</i> 4. <i>FreeFloat</i> 	Hasil dari penelitian ini menemukan bukti bahwa pengungkapan nilai wajar terkait pengukuran mengurangi asimetri informasi. Peneliti menemukan hubungan negatif antara tingkat pengungkapan nilai wajar dengan <i>bid-ask spread</i> .
4.	Apriliyanto, Anggi Arsandi (2016)	Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Asimetri Informasi Dimoderasi Oleh <i>Corporate Governance</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Independen : Konservatisme Akuntansi • Dependen : Asimetri Informasi • Moderasi : <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> 	Hasil dari penelitian ini menemukan bukti bahwa kepemilikan institusioanal yang merupakan proxy <i>good corporate governance</i> mampu memoderasi hubungan antara konservatisme akuntansi dengan asimetri informasi. Penelitian ini menjelaskan bahwa kepemilikan institusional memiliki kemampuan mengendalikan pihak manajemen melalui monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen dalam memberikan informasi yang tidak tepat kepada para prinsipal.
5.	Paoloni, M., Paolucci, G., & Menicucci, E. (2017)	<i>Fair Value Accounting and Earnings Quality (EQ) in Banking Sector: Evidence from Europe</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Independen : <i>Fair Value Accounting</i> • Dependen : <i>Earnings Quality</i> • Kontrol : <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Size</i> 2. <i>Leverage</i> 	Hasil penelitian ini menemukan bahwa bank-bank Eropa dengan pelaporan Nilai Wajar yang besar dalam laporan keuangan mereka memiliki peringkat <i>Earnings Quality</i> agregat yang lebih tinggi.

6.	Geraldina, I. (2018)	Kandungan Informasi Laba dari Nilai Wajar Aset Keuangan Bank	<ul style="list-style-type: none"> • Dependen : Kandungan Laba Masa Depan • Independen : Implementasi PSAK 50 & 55 dan Penggunaan Nilai Wajar 	<p>Penelitian ini menemukan bahwa kandungan informasi laba masa depan bank telah meningkat setelah penerapan wajib PSAK 50 dan 55, tetapi penggunaan nilai wajar aset keuangan telah mengurangi kandungan informasi laba bank di masa depan. Komponen terbesar yang mungkin dapat menurunkan kandungan laba masa depan pada periode setelah implementasi PSAK 50 & 55 adalah penggunaan nilai wajar aset keuangan kategori <i>fair value through profit or loss</i> (FVTPL)</p>
7.	Sodan, S. (2015)	<i>The Impact of Fair Value Accounting on Earnings Quality in Eastern European Countries</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dependen : <i>Earnings Quality</i> • Independen : <i>Fair Value Accounting</i> • Kontrol : <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Size</i> 2. <i>Accounting Leverage</i> 3. <i>Industry</i> 	<p>Temuan empiris awal menunjukkan bahwa perusahaan dan bank dengan peningkatan exposure terhadap akuntansi nilai wajar dalam pelaporan keuangan memiliki tingkat kualitas laba agregat yang lebih rendah.</p>

Penelitian tentang pengaruh atau dampak pengukuran nilai wajar (*fair value measurement*) terhadap tingkat asimetri informasi di Indonesia masih sangat terbatas. Namun, penelitian ini telah dilakukan di beberapa negara lain. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Fontes, dkk (2018) dengan menguji sampel bank di Eropa yang telah menggunakan IFRS menemukan bukti bahwa pengukuran nilai wajar mampu menekan atau menurunkan tingkat asimetri informasi (hubungan negatif dan signifikan) bahkan hubungan ini akan semakin negatif apabila perbankan mengakui *own credit risk* (OCR). Sejalan dengan penelitian Fontes, dkk (2018), Altawalbeh (2020) dan Vergauwe dan Gaeremynck (2019) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara pengukuran nilai wajar terhadap asimetri informasi. Paoloni, dkk (2017) menemukan bahwa bank-bank Eropa dengan pelaporan Nilai Wajar yang besar dalam laporan keuangan mereka memiliki peringkat *Earnings Quality* agregat yang lebih tinggi.

Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sodan, (2015) yang menemukan bukti bahwa perusahaan dan perbankan dengan peningkatan exposure terhadap akuntansi nilai wajar dalam pelaporan keuangan mereka memiliki tingkat kualitas laba agregat yang lebih rendah. Penelitian ini hampir sama dengan Geraldina (2018) yang menemukan bukti bahwa penggunaan nilai wajar aset keuangan telah mengurangi kandungan informasi laba bank di masa depan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aprilianto (2016), dengan menguji hubungan antara konservatisme akuntansi terhadap asimetri informasi yang dimoderasi oleh *good corporate governance*

menemukan bukti bahwa *corporate governance* dapat menurunkan tingkat asimetri informasi karena memiliki kemampuan mengendalikan pihak manajemen melalui monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen dalam memberikan informasi yang tidak tepat kepada para prinsipal.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Penerapan Pengukuran Nilai Wajar Aset Bank Terhadap Tingkat Asimetri Informasi

Asimetri informasi adalah keadaan dimana terdapat perbedaan tingkat informasi yang dapat diterima oleh salah satu pihak yang berkepentingan dalam suatu transaksi bisnis. Adanya kesenjangan informasi yang diterima oleh pihak-pihak yang bertransaksi menjadikan salah satu unggul dan yang lainnya lemah atas informasi. Fenomena asimetri informasi dapat membuat persepsi dan pemahaman pihak yang bertransaksi berbeda dalam menilai suatu aset yang diperdagangkan.

Fenomena asimetri informasi dapat dilihat dari nilai *bid-ask spread*. Semakin tinggi *bid-ask spread* mengindikasikan asimetri informasi tinggi, dan sebaliknya. Adanya fenomena asimetri informasi menandakan bahwa tujuan utama pelaporan keuangan telah gagal dicapai yaitu, menyediakan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditur dan pihak berkepentingan lainnya. Dasar dari perumusan tujuan pelaporan keuangan adalah teori pemangku kepentingan yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan,

namun juga harus memberi manfaat bagi *stakeholders* mereka. Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa hubungan antara perusahaan sebagai sebuah entitas memiliki responsibilitas dan akuntabilitas terhadap *stakeholders*. Salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan dalam rangka memberikan manfaat bagi para *stakeholders* adalah dengan memberi dan menyajikan informasi yang relevan sehingga dapat berdaya guna dalam pengambilan keputusan investasi investor.

Berbagai upaya terus dikembangkan oleh *standard-setters* untuk menekan atau bahkan menghilangkan fenomena asimetri informasi. Salah satunya adalah pengembangan konsep pengukuran nilai wajar (*fair value measurement*) yang dianggap lebih relevan dari pada pengukuran berbasis biaya historis (*historical cost*). Hal ini sejalan dengan Ball (2006) yang mengatakan bahwa IASB dan FASB lebih menganjurkan untuk menggunakan pengukuran nilai wajar pada laporan keuangan karena laporan yang dihasilkan lebih relevan untuk investor dan kreditor dibandingkan informasi yang menggunakan pengukuran berbasis akuntansi biaya historis (*historical cost*). Maka, dapat dikatakan bahwa penggunaan pengukuran nilai wajar baik untuk aset maupun liabilitas akan memberikan informasi yang lebih relevan dan berguna bagi investor maupun *stakeholders* lainnya dan dapat meminimalkan munculnya asimetri informasi.

Pengukuran nilai wajar diproksikan dengan kelengkapan aset (*assets completeness*). Semakin besar tingkat kelengkapan aset, maka

semakin tinggi pula tingkat informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh investor dalam proses pengambilan keputusan mereka dapat tersaji pada laporan keuangan. Dengan semakin banyak informasi yang tersedia secara relevan, maka semakin kecil tingkat asimetri informasi.

Penelitian terdahulu yang menguji tentang pengukuran nilai wajar terhadap tingkat asimetri informasi diantaranya seperti Fontes et al (2018) yang menemukan bahwa *fair value measurement* aset dikaitkan dengan tingkat asimetri informasi yang jauh lebih rendah dan penurunan ini lebih dari dua kali lipat ketika bank juga mengakui OCR (*own credit risk*). Artinya, konsep pengukuran nilai wajar yang dicetuskan oleh IASB sebagai *standard-setters* untuk menanggapi serangkaian problematika terkait asimetri informasi membuahkan hasil yang cukup baik. Penemuan Fontes et al (2018) mengindikasikan bahwa *fair value measurement* (FVM) memiliki manfaat bagi laporan keuangan dan menjawab problematika seputar asimetri informasi.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Altawalbeh (2020) dengan menguji sampel bank di Yordania menemukan bahwa nilai wajar memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap informasi asimetri di bank Yordania. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan pengukuran nilai wajar (*fair value measurement*) memberikan data yang lebih relevan kepada pemangku kepentingan dan mencerminkan nilai informasional kepada investor yang lebih tinggi. Berdasarkan *grand theory* dan penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Penerapan pengukuran nilai wajar (*fair value measurement*) atas aset berpengaruh negatif terhadap tingkat asimetri informasi.

2. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Hubungan antara Pengukuran Nilai Wajar dan Tingkat Asimetri Informasi

Good corporate governance (GCG) atau dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan konsep tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu mekanisme untuk mengendalikan, mengatur dan mengelola bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas. Dimana, tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan *shareholders value*. *Good corporate governance* sebagai suatu konsep tentang tata kelola perusahaan yang baik yang mengedepankan prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran serta kesetaraan dianggap sebagai salah satu alat yang dapat mengontrol perilaku dan tindakan dari manajer (Suwardi et al., 2018).

Seperti halnya dengan *fair value measurement* yang merupakan suatu konsep pengukuran baru yang diharapkan dapat memberikan lebih banyak informasi yang relevan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan munculnya fenomena asimetri informasi, *good corporate governance* juga merupakan konsep tata kelola perusahaan yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran. Konsep tata kelola perusahaan juga menekankan pada perlakuan yang setara terhadap pemangku kepentingan dan tidak hanya memaksimalkan utilitas golongan tertentu. Tata kelola perusahaan menjadi salah satu

elemen yang mampu mengontrol tindakan manajemen dengan adanya peran dari para pemangku kepentingan. Dengan penerapan konsep tata kelola yang baik, diharapkan semua informasi dapat disajikan secara merata, transparan dan bertanggungjawab.

Good Corporate Governance (GCG) memiliki prinsip-prinsip serta mekanisme yang mampu mengatur dan menjadi batasan perusahaan dalam melakukan tata kelola. Salah satu mekanisme *good corporate governance* adalah proporsi kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang mengawasi kegiatan operasional sebuah perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen yang kuat. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aset perusahaan.

Kurniyawati (2019) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan oleh pihak insvestor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *oportunistic* atau *self interest*. Dengan semakin baiknya kualitas informasi keuangan, semakin rendah tingkat asimetri informasi. Artinya, akuntansi telah memenuhi perannya dengan menyediakan informasi yang berdaya guna. Dengan masih adanya keraguan tentang kebermanfaatan penerapan pengukuran nilai wajar diharapkan dengan semakin baiknya tata kelola perusahaan dapat meminimalkan kelemahan-kelemahan dari *fair value measurement*. Maka,

berdasarkan *grand theory* serta penelitian terdahulu dirumuskan hipotesis kedua dari penelitian ini sebagai berikut:

H2: Penerapan pengukuran nilai wajar aset berpengaruh negatif terhadap tingkat asimetri informasi, hubungan ini semakin negatif dengan semakin baiknya tingkat *good corporate governance* bank.

D. Kerangka Konseptual

Asimetri informasi adalah salah satu permasalahan dalam ilmu ekonomi yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Asimetri informasi mengindikasikan bahwa adanya kesenjangan informasi yang terjadi antara dua pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi (perusahaan). Baik itu informasi yang disajikan tidak lengkap, transparan atau mungkin informasi tersebut telah terdistorsi oleh sikap oportunistik manajer sebagai akibat dari adanya masalah keagenan. Masalah keagenan menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara pihak agen (manajer) dengan pihak prinsipal (pemilik). Sedangkan, pada dasarnya perusahaan sebagai sebuah entitas memiliki tanggungjawab untuk seluruh *stakeholders* mereka, seperti yang dijelaskan oleh teori pemangku kepentingan (*stakeholders theory*).

Teori *stakeholders* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan, namun juga harus memberi manfaat bagi *stakeholders* mereka. *Stakeholders* merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau perhatian pada permasalahan perusahaan salah satunya investor. Teori pemangku kepentingan menyatakan

bahwa hubungan antara perusahaan sebagai sebuah entitas memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas terhadap *stakeholders*.

Salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan dalam rangka memberikan manfaat bagi para *stakeholders* adalah dengan memberi dan menyajikan informasi yang relevan sehingga dapat berguna. Informasi akuntansi merupakan salah satu kebutuhan bagi para *stakeholders* dalam mengambil keputusan ekonomi. Informasi yang relevan, transparan dan tepat waktu dapat berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan *stakeholders* dalam pengambilan keputusan. Dengan menyajikan informasi yang relevan dan tepat waktu serta dipublikasikan dengan transparan diharapkan dapat menghindari munculnya fenomena asimetri informasi. Namun, pada praktiknya di lapangan fenomena asimetri informasi masih sering ditemukan. Oleh karena itu, para *standard-setters* terus berupaya menemukan konsep-konsep akuntansi yang dapat meminimalkan munculnya fenomena asimetri informasi. Hal ini dikarenakan asimetri informasi dapat merugikan pihak *stakeholders* dimana, mereka merupakan pihak yang memiliki keterbatasan informasi.

Pengukuran nilai wajar dianggap sebagai salah satu alternatif dalam mengatasi ketidakmampuan konsep akuntansi biaya historis dalam menyediakan data yang relevan bagi para investor. Beberapa penelitian membuktikan bahwa nilai wajar dapat meningkatkan kualitas laba dengan menekan tingkat asimetri informasi. Hal ini disebabkan karena, konsep

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan dan Implikasi

Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh penerapan pengukuran nilai wajar aset bank terhadap asimetri informasi yang dimoderasi oleh *good corporate governance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang diajukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: (1) Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa penerapan pengukuran nilai wajar (*fair value measurement*) atas aset bank berpengaruh negatif terhadap tingkat asimetri informasi, ditolak. Sedangkan untuk hipotesis 2 yang menyatakan bahwa penerapan pengukuran nilai wajar (*fair value measurement*) atas aset bank berpengaruh negatif terhadap tingkat asimetri informasi, hubungan ini semakin negatif dengan semakin baiknya tingkat *good corporate governance* bank, juga ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa *good corporate governance* kurang tepat dijadikan sebagai variabel moderasi pada penelitian ini.

Implikasi dari penelitian ini adalah menambah pandangan bahwa penerapan pengukuran nilai wajar tidak dapat memberikan dampak yang signifikan pada kondisi pasar yang tidak likuid serta pandangan bahwa asimetri informasi dapat terkait dengan pengukuran nilai wajar apabila aset yang diukur pada *fair value through profit or loss* (FVTPL) semakin tinggi. Pada penelitian ini yang menggunakan sampel bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019 masih sedikit yang mengukur aset keuangannya pada

FVTPL. Dimana, rata-rata jumlah aset yang diukur pada FVTPL hanya berkisar diangka 1,4% saja dari total aset keuangan bank. Selain itu, juga ditemukan bukti bahwa beberapa aset keuangan yang diperdagangkan oleh perusahaan perbankan di BEI tergolong pada pasar kurang likuid. Hal ini dilihat pada nilai *spread* yang besar dari 1 (>1). Nilai maksimum *spread* berada pada angka 21, 11 dan nilai rata-rata 2,12. Adapun implikasi lainnya dari penelitian ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel pengukuran nilai wajar (*fair value measurement*) atas aset dengan variabel asimetri informasi.

B. Keterbatasan

Peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa. Namun, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu diperbaiki bagi peneliti selanjutnya, yaitu antara lain:

1. Tidak semua perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019 mengukur aset mereka dengan menggunakan *fair value through profit or loss* (FVTPL) sebagian kecil masih mengukur aset pada *other comprehensive income* (OCI) dan sebagian kecil belum menerapkan konsep *fair value* secara menyeluruh untuk pengukuran aset. Sehingga, peneliti tidak dapat menginterpretasikan data secara menyeluruh.
2. Terdapat beberapa saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019 yang tidak diperdagangkan secara aktif, dimana terdapat beberapa harga saham yang tidak bergerak dari awal *market open*

hingga *market close*. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pasar saham tidak aktif untuk beberapa saham perbankan.

3. Penelitian ini baru memberikan gambaran pada perusahaan sektor perbankan, sehingga data penelitian tidak dapat mewakili keseluruhan perusahaan pada Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.
4. Tahun pengamatan yang digunakan dalam pengambilan sampel hanya mencakup 3 tahun amatan yaitu dari tahun 2017-2019. Sehingga hasil penelitian tidak dapat mengeneralisasi secara keseluruhan data.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menganalisis sampel pada sektor perusahaan yang berbeda dan menggunakan ruang lingkup sampel yang lebih luas.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang waktu pengamatan sehingga, diharapkan hasilnya lebih dapat mengeneralisasi kesimpulan penelitian.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti pada tema yang sama diharapkan dapat menggunakan dan memperluas variabel independen dan khususnya variabel moderasi yang berhubungan dengan variabel dependen penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Altawalbeh, M. A. (2020). The Impact of Fair Value Accounting on Information Asymmetry: Evidence from Jordanian Banking Sector. *International Business Research*, 13 (9).
- Apriliyanto, A. A. (2016). Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Asimetri Informasi Dimoderasi Oleh *Corporate Governance*.
- Boediono, S.B. (2005). Kualitas Laba: Studi Pengeruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Solo, 15-16 September
- Ball, R. (2006). International Financial Reporting Standards (IFRS): Pros and Cons for Investors. *Accounting and Business Research*, 36, 5-27
- Duli, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Analisis Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Deepublish.
- Evans, M.E., Hodder, L., & Hopkins, P.E. (2014). The Predictive Ability of Fair Values for future Financial Performance of Commercial Banks and the Relation of Predictive Ability to Bank's Share Prices. *Contemporary Accounting Research*, 31(1).
- Fontes, J. C., Panaretou, A., and Peasnell, K. V. (2018). The Impact of Fair Value Measurement for Bank Assets on Information Asymmetry and the Moderating Effect of Own Credit Risk Gains and Losses. *The Accounting Review*, 93(6).
- Fajriana, N., Aviyanti, R. D. (2019). Akuntansi Nilai Wajar: Perdebatan yang Tidak Berujung. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 8(1).
- Geraldina, I. (2018). Kandungan Informasi Laba dari Nilai Wajar Aset Keuangan Bank. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 5(2).
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ikatan Akuntansi Indonesia. *PSAK No. 1 Tentang Laporan Keuangan*— edisi revisi 2018. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafin.
- Irwondy, I. S., & Hubeis, M. (2016). Pengaruh Penerapan Konsep *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Non-Keuangan di Kantor Pusat PT. Asuransi Jasa Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 7(2).
- Khomsatun, S. (2016). Penerapan Pengukuran Nilai Wajar PSAK-Konvergensi IFRS dan Dampaknya pada Pilihan Kebijakan Akuntansi di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4(2).
- Krumwiede, T. (2008). Why Historical Cost Accounting Makes Sense. *Strategic Finance*. 33-39
- Kurniyawati, I. (2019). Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Good Corporate Governance Terhadap Asimetri Informasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, IV(1).
- Lestari, S.D., & Wirawati, N.G.P. (2016). Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi Pengaruh Asimetri Informasi pada Manajemen Laba. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1).

- Lisa, O. (2012). Asimetri dan Manajemen Laba: Suatu Tinjauan dalam Hubungan Keagenan. *Jurnal WIGA*, 2(1).
- Lubis, A. I. (2019). *Akuntansi Keperilakuan: Akuntansi Multiparadigma*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nissim, D. (2003). Reliability of Bank's Fair Value Disclosure for Loans. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 20. 355-384
- Nur, M., & Priantinah, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Nominal*, 1(1).
- Pratiwi, M., & Siswanto, D. (2017). Pengaruh Akuntansi Nilai Wajar Terhadap Manajemen Laba: Peran Moderasi Status Perusahaan dalam Indeks Saham Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2 (2)
- Putra, G. (2006). Studi Penerapan Prinsip-Prinsip OECD 2004 dalam Peraturan Bapepam Mengenai Corporate Governance. *Papers*.
- Richardson, V.J. (1998). Information Asymmetry and Earnings Management: Some Evidence. *Disertation University of Kansas, March*
- Ramadhani, D., & Sebrina, N. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Relevansi Nilai Informasi Hierarki Nilai Wajar (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 181—197.
- Salim, J. (2010). *10 Investasi Paling Gampang & Paling Aman*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Sari, R. N., Al Musadieq, M., & Sulisty, M. C. (2018). Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 60(1).
- Scott, W.R. (2015). *Financial Accounting*. Canada: Pearson
- Sodan, S. (2015). The Impact of Fair Value Accounting on Earnings Quality in Eastern European Countries. *Procedia Economics and Finance* 32. 1769-1786
- Sukendar, H. (2012). Konsep Nilai Wajar (Fair Value Measurement) dalam Standar Akuntansi Berbasis IFRS di Indonesia Apa dan Bagaimana?. *Binus Business Review*, 3(1).
- Sutedja. (2006). Pengungkapan (Disclosure) Laporan Keuangan sebagai Upaya Mengatasi Asimetri Informasi. *Jurnal Infestasi*, 3(1).
- Suwandi, I., Arifianti, R., & Rizal, M. (2018). Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* pada Pt. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2(1).
- Suwardjono. (2014). *Teori Akuntansi: Perekrayaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPF.
- Vergauwe, S., & Gaeremynck, A. (2019). Do Measurement-Related Fair Value Disclosures Affect Information Asymmetry?. *Accounting and Business Research*, 49(1).
- Wing, W. (2009). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Yanti, N. (2013). Analisis Kinerja Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal KBP*, 1(2).